

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
SARANA DAN PRASARANA TK NEGERI PEMBINA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Muhammad Isra

NPM : 177310437

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Isra
NPM : 177310147
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Format sitematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah disusun sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Dr. Ranggi Ate Febrian, S.IP, M.Si

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Isra
NPM : 177310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai Relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Metode Penelitian Ilmiah, Oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Ketua,  Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si	Sekretaris,  Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si
Turut Menyetujui, Wakil Dekan I  Indra Safri, S.Sos, M.Si	Anggota,  Yendri Nazir, S.Sos, M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1273 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Isra
N.P.M : 177310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.**

Struktur Tim :

1. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 01 Desember 2021


Dekan, **Dr. Akmal Latif, M.Si.**
NPK 006104337

Disampaikan Kepada :
Yth. Bapak Rektor UIR
Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
Yth. Ketua Prodi.....
Arsip -----sk.penguji-----

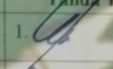

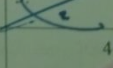
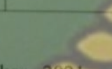
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1643 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 November 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini Kamis tanggal 01 Desember 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Isra
NPM : 177310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 02 Desember 2021
An. Dekan


Tudra Saltri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Isra
NPM : 177310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 14 Desember 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Ergot Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbal alamin tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berangkai kan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Sayyidina Muhammad Wa’alaa Alihii Sayyidina Muhammad”, assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Nabiyullah, assalamualaika ya Habibullah.

Adapun judul dari skripsi ini yaitu “Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi ini penulis tulis dan ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian komprehensif pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan sertakesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulisterutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis

terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik di lingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Ibu kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ibu : Nurhayati dan Ayah : Suhartono, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil, motivasi, maupun doa - doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
9. Abang, kakak, adik beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan proposal ini.
10. Kawan satu kelas Awi, Fadli, Ari, Agung, Imam, Alvin dan seluruh kelas IP A angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Aamiin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada

seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Isra



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.2 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II	
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
2.1 Konsep Pemerintahan.....	11
2.2 Konsep Pemerintahan Daerah	12
2.3 Konsep Peran.	16

2.4 Konsep Dinas Pendidikan	22
2.5 Konsep Kualitas	26
2.6 Konsep Sarana dan Prasarana.....	29
2.7 Konsep Sekolah	31
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pikir.....	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	41
 BAB III	
METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	48
 BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	49
B. Visi Dan Misi	51

C. Susunan Oraganisasi Dinas Pendidikan	52
D. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas	53
E. Struktur Organisasi Tk Negeri Pembina Tembilahan.....	61

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
--------------------------------------	----

A. Identitas Informan	64
-----------------------------	----

B. Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas

Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir	67
---------------------------------	----

1. Penyusunan Program	68
-----------------------------	----

2. Penyelenggaraan Kebijakan.....	73
-----------------------------------	----

3. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pelaporan	76
--	----

C. Hambatan-hambatan Peran Dinas Pendidikan Dalam

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri

Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	78
--	----

BAB VI

PENUTUP.....	81
--------------	----

A. Kesimpulan	81
---------------------	----

B. Saran.....	84
---------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Daftar Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan	7
Tabel II.1: Penelitian terdahulu dengan permasalahan yang relatif sama.....	32
Tabel II.2 : Konsep Operasional Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan.....	41
Tabel III.1 : Key Informan dan Informan pada penelitian Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan	45
Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian	48
Tabel IV.1 : Daftar Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan...	63
Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian	64
Tabel V.2 : Tingkat Umur Informan	65
Tabel V.3 : Tingkat Pendidikan Informan Penelitian	66
Tabel V.4 : Jenis Kelamin Informan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	25
Gambar II.2: Kerangka Berpikir Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan	38



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian	89
Daftar Pertanyaan Wawancara	99
Surat Riset Penelitian	100



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Isra
NPM : 177310437
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul UP : Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

atakan,


Muhammad Isra

**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
SARANA DAN PRASARANA TK NEGERI PEMBINA TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Muhammad Isra

Kata Kunci : Peran, Dinas Pendidikan, Sarana dan Prasarana, Taman Kanak-Kanak

Usia dini merupakan masa yang sangat penting dan berpengaruh terhadap seluruh tahapan perkembangan seorang manusia. Taman Kanak-kanak sebagai lembaga yang ditujukan untuk anak usia dini perlu memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Tetapi tidak semua jenjang pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Disinilah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir berperan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan, sekaligus untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan adalah Penyusunan Program, Penyelenggaraan Kebijakan, dan Pembinaan, pengawasan, serta evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dari penelitian ini ialah Kabid PAUD, Kasi PAUD, Staf Teknis PAUD, dan Kelapa Sekolah TKN Pembina Tembilahan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah melaksanakan perannya dengan cukup baik walaupun masih ditemukan hambatan-hambatan. Dinas Pendidikan dengan sigap datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sarana yang rusak atas laporan dari TK, dan menilai kondisinya. Jika *urgent*, Dinas mengajukan usulan perbaikan, jika diterima, kegiatan dapat dilaksanakan.

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN INCREASING
THE QUALITY OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE OF THE
STATE KINDERGARTEN DEVELOPMENT OF TEMBILAHAN
INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

Muhammad Isra

Keywords : Role, Departemen of Education, Facilities and Infrastucture, Kindergarten

Early age is a very important period and affects all stages of human development. Kindergarten as an institution aimed at early childhood needs to have educational facilities and infrastructure that support the success of education. But not all levels of education have adequate facilities and infrastructure. This is where the Education Office of Indragiri Hilir Regency plays a role in improving the quality of the facilities and infrastructure of the Tembilahan State Kindergarten. This study discusses the role of the Education Office of Indragiri Hilir Regency in improving the quality of the facilities and infrastructure of the Pembina Tembilahan State Kindergarten, as well as to find out the obstacles and obstacles faced by the Education Office in implementing the procurement and rehabilitation of facilities and infrastructure at the Pembina Tembilahan State Kindergarten, Indragiri Hilir Regency. The indicators that are the focus of research on the role of the Education Office in Improving the Quality of Facilities and Infrastructure of the Tembilahan State Kindergarten are Program Development, Policy Implementation, and Guidance, supervision, and evaluation. This study uses a qualitative method. Informants from this study were the Head of the PAUD, Head of PAUD, PAUD Technical Staff, and the Head of the TKN Pembina Tembilahan School. The method used in data collection is Observation, Interview, and Documentation. The results of this study indicate that the Department of Education has carried out its role quite well, although there are still obstacles. The Education Office swiftly came to the location to check the condition of the damaged facilities based on the reports from the TK, and to assess their condition. If it is urgent, the Office submits a proposal for improvement, if it is accepted, the activity can be carried out.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ada banyak faktor pendukung untuk keberhasilan suatu proses pendidikan. Misalnya kurikulum yang solid, tenaga pendidik yang profesional, sarana pendidikan yang lengkap, suasana belajar yang tenang, tingkat intelegensi siswa yang diatas rata-rata dan lain-lain (Rahayu, 2015). Namun demikian, proses pendidikan tetap berlangsung hingga saat ini meskipun tidak selalu didukung oleh faktor-faktor pendukung tersebut. Sehingga produk sumber daya manusia yang dikeluarkan menjadi lulusan yang tidak memiliki keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupannya di masa yang akan datang.

Sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, yaitu untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sekolah menjadi ujung tombak dan mempunyai peran yang sangat strategis. Melalui bidang pengajaran, sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan

intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan negara (Gazali, 2013)

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah di Indonesia memasuki era baru. Hakikat otonomi daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan inisiatif daerah lokal dalam membangun kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) mengatakan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pendidikan merupakan salah satu urusan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang termasuk dalam urusan Konkuren yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Usia dini (0-6 tahun) merupakan masa yang sangat penting dan berpengaruh terhadap seluruh tahapan perkembangan seorang manusia. Masa ini sering disebut dengan usia emas atau *golden age* karena di periode ini potensi kecerdasan anak berkembang lebih pesat dibanding periode selanjutnya. Oleh karena itu, anak-anak usia dini sangat membutuhkan layanan pendidikan agar proses tumbuh kembang berbagai potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal.

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 14 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD dapat diselenggarakan melalui beberapa jalur, yaitu formal (TK/RA/BA/bentuk lain sederajat), nonformal (KB/TPA/bentuk lain sederajat), dan informal (diselenggarakan keluarga/lingkungan/masyarakat).

Taman Kanak-kanak adalah lembaga pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 4-6 tahun untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar anak dapat mengembangkan potensinya sejak dini sehingga anak dapat berkembang secara wajar sebagai seorang anak.

Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung.

Selanjutnya, penjelasan tentang prasarana yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD telah disebutkan mengenai prinsip dan persyaratan prasarana yang wajib dimiliki sebuah lembaga PAUD.

Menurut (Kasan, 2000) sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun prasarana belajar menurut (Makin, 2010) adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan sebagainya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Sarana dan Prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Dalam Peraturan Bupati No.47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai sebagai percontohan dan terobosan dalam perkembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 Kecamatan dan jumlah TK Negeri Pembina sama dengan jumlah kecamatan yaitu 20 TK Negeri Pembina. Hingga saat ini tercatat 474 lembaga PAUD telah berdiri yang tersebar di 236 Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Inhil. Artinya, jumlah PAUD di Kabupaten Inhil sudah

melebihi target pemerintah dalam Program Satu Desa Satu PAUD. Berkat usaha tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan beberapa penghargaan atas prestasinya, yaitu :

- Bunda PAUD Inhil, Zulaikhah Wardan menerima penghargaan sebagai juara 1 apresiasi Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau (2016)
- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima penghargaan dengan kategori Bupati terbaik pertama dalam ajang Puncak Gebyar PAUD. Hj Zulaikhah Wardan mendapat penghargaan sebagai Bunda PAUD Kabupaten/Kota terbaik kedua se-Riau (2017).
- Inhil meraih penghargaan sebagai kota layak anak 2018 kriteria pratama pada acara penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 yang ditaja oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018).

Dengan penghargaan yang didapat tentunya menunjukkan kualitas PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun ternyata di Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, TK Negeri Pembina Tembilahan yang merupakan TK Negeri dengan murid terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penulis melihat kondisi sarana prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan dalam kondisi kurang baik, seperti taman bermain yang tergenang air dan becek setelah hujan, toilet dalam kondisi kurang baik, pondopo dalam kondisi rusak sedang, juga terlihat ada plafon ruang kelas yang sepertinya perlu untuk diganti. Penulis juga melihat bahwa ada beberapa sarana

prasarana yang tidak dimiliki TK Negeri Pembina Tembilahan seperti tidak adanya perpustakaan, UKS, dan ruang TU.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di TK Negeri Pembina Tembilahan sebagai berikut :

Tabel I.1 : Daftar Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Ruang Belajar	5	Baik
2	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
3	Ruang TU	-	Tidak ada
4	Ruang Majelis Guru	1	Baik
5	Perpustakaan	-	Tidak ada
6	Pendopo	1	Rusak Berat
7	Gudang	1	Baik
8	Ruang Dapur	1	Baik
9	WC	3	1 Baik, 2 Rusak Sedang
10	UKS	-	Tidak ada
11	Area Bermain	1	Rusak Sedang

Sumber : Profil TK Negeri Pembina Tembilahan

Dari hasil observasi penulis menemukan beberapa fenomena antara lain :

1. Ditemukan beberapa sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan dalam kondisi kurang baik, seperti area bermain, pendopo, dan toilet dalam kondisi rusak sedang.

2. Sarana prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan yang kurang lengkap, seperti tidak adanya Perpustakaan, UKS, dan ruang TU.

Alasan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini yaitu karena penulis menemukan fenomena fenomena tersebut di TK Negeri Pembina Tembilahan yang merupakan TK Negeri dengan murid terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana adanya ketidaksesuaian antara kualitas sarana prasarana TK dengan penghargaan yang telah di dapat oleh PAUD Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan.

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini untuk mengetahui “Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan?
2. Apa saja hambatan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan?

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang akan dibahas sehingga menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan dan Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

1.2 Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.

- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penulisan diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

2.1 Konsep Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai : perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara, atau perihal(Syafie, 2014)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 2015).

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil (Ndraha, 2015)

Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan(Ndraha, 2015)

Menurut (Sedarmayanti, 2004)Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai Pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. **Mencerdaskan kehidupan bangsa**
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

2.2Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “*autonomic*” yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang - undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Agustian, 2008).

Desentralisasi adalah akuisisi kewenangan pemerintah dari pemerintah kepada daerah otonom dengan tujuan kelola pemerintah daerah sendiri. Desentralisasi termasuk struktur organisasi yang mendefinisikan bagaimana memberdayakan. Desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Haris, 2005).

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

1. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi dan Gubernur dan Bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah

daerah atau tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga kepada desa dengan bentuk penugasan secara langsung.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olahraga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.



Urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Kehutanan.
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan.
7. Perindustrian.
8. Transmigrasi.

2.3 Konsep Peran

Pengertian peran menurut (Soekanto, 2002) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Diperlukan suatu indikator untuk mengetahui peranan dalam penelitian ini yaitu Peran Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana di TK Negeri Pembina Tembilahan.

Menurut (Bastian, 2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran



(*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), dimana

Indra Bastian menjelaskan :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (1987:221).

Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Akan tetapi sedangkan menurut Poerwadarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan. Dimiliki oleh orang atau seseorang yang kedudukannya dimasyarakat. Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah, “ merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam suatu masyarakat”.

Bryant dan White dalam Amira (2012: 9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang

didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut tersebut.

Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peran. Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas suatu yang sesuai dengan adanya teori diatas sehingga dapat dikemukakan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang atau lembaga dimana posisi seseorang yang melakukan atau memainkan interaksi antara individu-individu atau secara berkelompok dengan maksud dan tujuan yang sama dalam meretas kejadian yang akan diselesaikan.

Dari beberapa teori yang dipaparkan diatas sehingga pada teori Soerjono Soekanto yang lebih menekankan pada posisi seseorang yang menempatkan diri pada keadaan yang memaksanya harus bertindak sesuai keinginan dan tanggungjawabnya sebagai seorang individu yang bermasyarakat. disamping itu pula peranan yang dimaksud dalam hal ini lebih mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga negara dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap pembangunan daerah. Adapun lembaga negara yang dimaksud ialah Tim Pengawasan Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) lembaga tersebut memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengkoordinasian sesama lembaga pemerintah akan pentingnya pembangunan berskala nasional dan pembangunan daerah.

Dalam hal ini peranan juga mencakup indikator keberhasilan dimana suatu lembaga dapat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hal berikut yakni :

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelolah sumber-sumber daya public maupun keamanan Negara. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparansi kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas Yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum) yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan

akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penyalahgunaan sumber dana publik.

b) Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

c) Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal.

d) Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.

4) Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5) Harus jujur, objektif, dan inofatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Sehingga Dengan demikian peranan tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab (akuntabilitas) baik individu maupun kelompok, apapun kedudukannya tanggungjawab harus tetap diutamakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang didasari dengan kewenangan masing-masing oknum pemerintah

2.4 Konsep Dinas Pendidikan

Dalam Peraturan Bupati No.47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini,

Kasi Sarana & Prasarana PAUD & DIKMAS memiliki fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
- d. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- e. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS
- f. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS

2.5 Konsep Kualitas

Dalam KBBI Kualitas artinya adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat atau taraf (mutu).

Definisi kualitas juga dikemukakan oleh Philip B. Crosby dalam (Nasution, 2005) menyatakan bahwa: Kualitas adalah memenuhi atau sama dengan persyaratan (conformance of requirement). Meleset sedikit saja dari persyaratan, maka suatu produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Persyaratan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan keinginan pelanggan, kebutuhan organisasi, pemasok dan sumber pemerintah, teknologi serta pasar atau pesaing.

Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:152), kualitas dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Berdasarkan definisi ini, kualitas adalah hubungan antara produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.

Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. (Abubakar & Siregar, 2010) Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas merupakan: “sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas.

Menurut Garvin (1984) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:143), setidaknya ada lima perspektif kualitas yang berkembang saat ini:

1. Transcendental Approach

Dalam perspektif ini, kualitas dipandang sebagai *innate excellence*, yaitu sesuatu yang secara intuitif dapat dipahami, namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan, sebagai contoh kecantikan atau cinta. Perspektif ini menegaskan bahwa orang hanya bisa belajar memahami kualitas melalui pengalaman yang didapatkan dan *eksposure* berulang kali (*repeated exposure*)

2. Product-Based Approach

Perspektif ini mengasumsikan bahwa kualitas merupakan karakteristik, komponen atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam hal kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Semakin banyak atribut yang dimiliki sebuah produk atau merek, semakin berkualitas produk atau merek bersangkutan.

3. *User-Based Approach*

Perspektif ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang menilainya (*eyes of the beholder*), sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang (*maximum satisfaction*) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang bersifat subyektif dan *demandoriented* ini juga menyatakan bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing yang berbeda satu sama lain, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan.

4. *Manufacturing-Based Approach*

Perspektif ini bersifat *supply-based* dan lebih berfokus pada praktik-praktik perancangan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan (*conformance to requirements*). Dalam konteks bisnis jasa, kualitas berdasarkan perspektif ini cenderung bersifat *operation-driven*.

5. *Value-Based Approach*

Perspektif ini memandang kualitas dari aspek nilai (*value*) dan harga (*price*). Dengan mempertimbangkan *trade-off* antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai *affordable excellence*, yakni tingkat kinerja ‘terbaik’ atau sepadan dengan harga yang dibayarkan. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli (*best-buy*).

2.6 Konsep Sarana dan Prasarana

Menurut KBBI sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media.

(Mulyasa, 2004) memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pembelajaran.

Menurut (Kasan, 2000) sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, labolatorium, dan sebagainya.

Menurut (Daryanto, 2008) secara bahasa yang disebut dengan prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya : lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.

Adapun prasarana belajar menurut (Makin, 2010) adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa sarana belajar bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan

yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan menerima materi pembelajaran. Sedangkan prasarana belajar untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.

Standardisasi Sarana dan Prasarana

Kata standardisasi (Handoko, 2011) bukan berasal dari kata *standard+isasi*, tetapi merupakan sebuah kata dasar hasil serapan dari bahasa asing. Kata standardisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk (ukuran atau kualitas) dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. (Barnawi & Arifin, 2012: 86). *Standardisasi* sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (Mulyasa, 2006: 20) Lebih lanjut diatur dalam Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD telah disebutkan mengenai prinsip dan persyaratan prasarana yang wajib dimiliki sebuah lembaga PAUD.

2.7 Konsep Sekolah

Menurut Daryanto dalam (Mulyasana & Dkk., 2020) sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran serta lembaga yang dirancang untuk meningkatkan kualitas belajar siswa sehingga menjadi manusia yang menguasai ilmu pengetahuan.

PAUD dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (Pasal 1,Ayat 14).

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK),Raudathul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 28, Ayat 3)

Taman Kanak-kanak menurut (Helmawati, 2015) yaitu pendidikan jalur formal untuk anak usia dini usia 4-6 tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Yang Relatif Sama

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
1	Fani Fitriani(2018)	Peran Dinas Pendidika Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota	Teori Peran : Peran Dinas Pendidikan adalah Pembina, pengendali, pengurus dan pengawas pendidikan dasar dan menengah	Dengan adanya peran Dinas Pendidikan maka tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas pentingnya pendidikan di Kota Pekanbaru akan semakin meningkat. Tetapi kenyataannya partisipasi

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
		Pekanbaru Tahun 2013 – 2015	agar terwujudnya pendidikan nasional.	<p>masyarakat terhadap pendidikan yang kurang ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya minat anak untuk bersekolah, besarnya jumlah saudara, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teman sebaya dan lain – lain. Adapun yang menjadi faktor penyebab masih adanya anak yang putus sekolah yaitu penyelewengan alokasi anggaran dan kurangnya penyuluhan di daerah terpelosok.</p> <p>Persamaan : sama-sama membahas peran dinas</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
				<p>pendidikan</p> <p>Perbedaan : membahas peran dinas dalam perumusan pelaksanaan pencegahan anak rawan putus sekolah, sedangkan penelitian penulis membahas peran dinas dalam meningkatkan kualitas</p>
2	Hermin Werdiningsih, Suzanna Ratih Sari (2016)	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penerapan Metoda Pembelajaran Yang Terintegrasi (<i>Integrated Lesson</i>)	Menurut Slamet Mulyana (2007) di bawah ini empat tahapan dalam penyelenggaraan Lesson Study. a. Tahapan Perencanaan (Plan) b. Tahapan	Laboratorium desain Lingkungan Binaan mewadahi beberapa mata kuliah dengan kasus lapangan atau pengamatan lingkup lingkungan, kawasan dan kota yang meliputi sekumpulan bangunan, dengan sistem pembelajaran yang

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
		<p><i>Learned)</i></p> <p>Dari Mata Kuliah Yang Serumpun</p>	<p>Pelaksanaan (Do)</p> <p>c. Tahapan Refleksi (Check)</p> <p>d. Tahapan Tindak Lanjut (Act)</p>	<p>digabungkan atau terintegrasi beberapa mata kuliah yang serumpun menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih efektif baik untuk mahasiswa maupun dosen 2. Perekayasa analisa mahasiswa lebih lengkap karena dari masing-masing mata kuliah saling menguatkan atau melengkapi. <p>Persamaan : sama-sama membahas tentang peningkatan kualitas</p> <p>Perbedaan : membahas tentang peningkatan</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
				kualitas melalui penerapan metoda pembelajaran, sedangkan penelitian penulis membahas peningkatan kualitas melalui peran dinas.
3	Rahayu Puji Suci, Suhermin, Triyonowati (2017)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pada Pos PAUD Di Kelurahan Merjosari	Skala prioritas yang menjadi sasaran Tim untuk solusi atas permasalahan kedua Pos PAUD adalah 1.Menghasilkan alat peraga edukatif (APE) dalam/ <i>indoor</i> dan APE luar/ <i>outdoor</i> .	Hasil implementasi instrumen tersebut adalah: a) Pos PAUD yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas, b). Lebih efisien tempat, waktu, tenaga dan biaya dalam pengelolaan Pos PAUD, c). Tatakelola manajemen maksimal, terprogram, terdata dengan baik dan benar

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Substansi
		Malang	<p>2.Menghasilkan penunjang proses belajar mengajar yang berupa meja dan kursi siswa sebagai sarana yang nyaman dalam proses pembelajaran Pos PAUD.</p> <p>3.Menghasilkan Pelatihan parenting berbasis pembelajaran berkualitas pada anak usia dini.</p>	<p>Persamaan : sama-sama membahas peningkatan kualitas</p> <p>Perbedaan : peningkatan kualitas di jurnal ini melalui penyediaan sarana, sedangkan penelitian penulis membahas peningkatan kualitas melalui peran dinas.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

C. Kerangka Pikir

Gambar II.2: Kerangka Berpikir Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan



Sumber : Modifikasi Penulis,2021

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam melakukan kepentingan publik, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugas negara serta dilengkapi dengan alat-alat negara sebagai penukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Peran adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Indikator Peran dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

Pada penelitian ini, PAUD yang dibahas adalah TK Negeri Pembina Tembilahan.

4. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan disini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kualitas artinya adalah tingkat baik buruknya sesuatu
6. Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan
7. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran
8. PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD disini adalah TK Negeri Pembina Tembilahan.
9. Taman Kanak-kanak yaitu pendidikan jalur formal untuk anak usia dini usia 4-6 tahun.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
Konsep Peranan Menurut Soekanto, 2002 yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan	Peran	Penyusunan Program	Efektifitas program, penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kesesuaian program dengan tujuan.
		Penyelenggaraan Kebijakan	Hasil atau target yang dicapai, bagaimana realisasi dan implementasi dari suatu program atau kegiatan
		Pembinaan, Pengawasan,	Mengukur kualitas Output, apa kegiatan

		dan evaluasi.	berjalan sesuai rencana, penyelenggaraan yang akuntabilitas, efektif dan efisien
--	--	---------------	--



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Maleong dalam (Herdiansyah, 2010), Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan TK Negeri Pembina Tembilahan.

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana adalah karena kondisi sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina yang kurang memadai. Padahal Inhil dinilai sebagai percontohan dan terobosan dalam perkembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Dengan penghargaan yang didapat, mestinya kualitas PAUD di Inhil sangat baik. Namun ternyata TK Negeri Pembina Tembilahan yang ada di Ibukota Kab. Inhil memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Karen itulah peneliti tertarik untuk meneliti kenapa kondisi sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina tembilahan kurang memadai, dan bagaimana peran dinas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2009) teknik ini adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya karena infoman dalam penelitian ini adalah orang yang kita anggap benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi, terutama mengenai judul peneliti mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan.

Tabel III.1 : Key Informan dan Informan pada penelitian Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dra. BASRIANI	Kabid PAUD dan DIKMAS	Informan
2	NURHAYATI, S.Mn	Kasi Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS	Key Informan
3	AL-IKHSANUL KHAIR, ST	Staf Teknis Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	Informan
4	TRIMURTI, S.Pd	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilahan	Informan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data

pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada di lapangan.

2. Teknik *Interview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi



Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Menurut (Nazir, 1988) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Setelah data-data diperoleh atau dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka selanjutnya data-data tersebut akan direduksi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengelompokan data agar dapat ditampilkan dalam penyajian data. Kemudian dilakukan analisis dan pembahasan untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat (penarikan kesimpulan).

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																				
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penelitian Lapangan																					
5	Pengelolaan dan analisa data																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi Skripsi																					
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan adalah organisasi Teknis/Fungsional dari tugas-tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan saat itu Dinas Pendidikan berada langsung dibawah Bupati. Kemudian telah dirancang sebuah Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Seiring berjalannya waktu Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian diubah lagi menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada masa peralihan peleburan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian diubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir, hingga sampai saat ini berdiri dan berada ditengah-tengah masyarakat serta menjalani dan melayani setiap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedinasan.

Sejarah Berdirinya TK Negeri Pembina Tembilahan

TK Negeri Pembina Tembilahan mulai berdiri tahun 1997, pada tahun 1998 sekolah selesai didirikan, tahun ajaran pertama yaitu tahun 1999 dimana operasi pertama dimulai dengan 1 ruang belajar, kepala sekolah bernama Ibu

Trimurti, S.Sos dengan satu guru yang bernama Ibu Murniati, dan TU yang bernama bapak Rifa'i. Pada tahun 2000 sudah menamatkan anak angkat pertama. Setelah tahun 2000 sampai sekarang TK Negeri Pembina semakin berkembang. Sekarang tahun 2020 jumlah ruang belajar ada 9 kelas, dengan murid 1 siswa, dengan jumlah guru 15 orang, guru PNS berjumlah 9 orang, guru bantu 4 orang, dan guru honorer 2 orang. Ada sembilan kelas yaitu, kelompok A 1 kelas, dan kelompok B 8 kelas.

Secara rinci, profil TK Negeri Pembina Tembilihan, yaitu:

- a. N a m a : TK Negeri Pembina Tembilihan
- b. Alamat : Jl. Keritang Tembilihan, RT 002, RW 005.
- c. Desa/Kelurahan : Tembilihan Hilir
- d. Tahun didirikan : 1997
- e. Luas tanah : 1706 m²
- f. Jenis Layanan : TK (Taman Kanak-kanak)
- g. Waktu Belajar : Pagi
- h. NPSN : 69768721
- i. Kepemilikan : Pemerintah
- j. Akreditasi : B
- k. Status Lembaga : Negeri

B. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pendidikan

VISI

Terwujudnya Lembaga Pendidikan Dikabupaten Indragiri Hilir Yang Mampu Melahirkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertaqwa, Berakhlak Mulia Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Beretos Kerja Mandiri, Berbudaya Dan Memiliki Daya Saing Pada Tahun 2021.

MISI

1. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Mampu Bersaing.
3. Menciptakan Sistem Dan Iklim Pendidikan Dan Pengajaran Yang Demokratis Transparan Dan Merata.

Visi dan Misi TK Negeri Pembina Tembilahan

Adapun visi dan misi TK Negeri Pembina Tembilahan, antara lain:

Visi TK Negeri Pembina Tembilahan

Visi TK Negeri Pembina Tembilahan, yaitu:

“Mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas terampil, dan mandiri”

Misi Visi TK Negeri Pembina Tembilahan

Misi TK Negeri Pembina Tembilahan, yaitu:

“Membentuk anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik, cerdas yang berintelektual dan kreatif, yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, cinta lingkungan dan tanah air”

C. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SD, Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SD;
 2. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket B, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMP;
 3. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMA, Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA;
 2. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMK, Pendidikan Kesetaraan Paket C, dan Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMK;
 3. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Bidang Sarana Pendidikan, terdiri dari:
1. Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;
 2. Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

D. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan lingkup Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, serta Sarana dan Prasarana Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan lingkup pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal, serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan lingkup pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal, serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. Penetapan perencanaan pembiayaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil (PNS) untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal, serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. Penyediaan, pemanfaatan dan pengawasan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
 - f. Pengawasan penggunaan buku-buku pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal;

- g. Pengaturan dan pengawasan penerimaan siswa baru, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat dan perlengkapan, pembangunan gedung, ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) ujian akhir, perpustakaan, tenaga pendidik dan tenaga fungsional;
- h. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian standar pendidikan dan ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
- i. Pengawasan, koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan BOS dan pendidikan bersubsidi, beasiswa;
- j. Pemberian rekomendasi izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
- k. Penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal bertaraf nasional dan internasional;
- l. Pemberian rekomendasi izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal berbasis keunggulan lokal;
- m. Penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah/kejuruan berbasis keunggulan lokal;
- n. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;

- o. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, kehumasan dan kesisteman, serta pendokumentasian dan keputakaan;
- p. Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan;
- q. Pelaporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, LPPD, serta Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas; dan
- r. Penyelenggaraan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Kesekretariatan lingkup urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan, serta Perencanaan dan Pengendalian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan kesekretariatan;

- d. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, dan kehumasan/protokoler, serta perencanaan dan pengendalian;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian SDM Aparatur;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- i. Pengoordinasian penyusunan pelaporan yang meliputi Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, serta Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kabid PAUD & DIKMAS

- f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat

dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- g. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
- h. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- j. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- k. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- l. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;

- m. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- n. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasi Sarana & Prasarana PAUD & DIKMAS

- g. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang
- j. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana PAUD &

DIKMAS lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS

- k. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS
- l. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- m. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS
- n. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD & DIKMAS lingkup pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- o. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS lingkup pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- p. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- q. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan seksi sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS lingkup pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS

- r. Menindaklanjuti surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- s. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan sarana & prasarana PAUD & DIKMAS lingkup pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana PAUD & DIKMAS
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya

E. Struktur Organisasi Tk Negeri Pembina Tembilahan

Pelindung :Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhil

Pembina :Kabid PAUD dan DIKMAS Disdik Inhil Kasi PAUD Disdik Inhil

Penasehat :Komite Bunda PAUD Pengawas TK

Ketua/ Kepala Sekolah:TRIMURTI, S.Sos

Sekretaris :HERLINDA, S.Pd.AUD

Bendahara :DESMAWATI SYAH, S.Pd

Seksi Administrasi : HENDRAWATI, S.Pd.AUD

EFRIANI, S.Pd.AUD

RINA SEPTRIANA

Seksi Kurikulum : IRMA DEWI HASIBUAN, S.Pd.AUD

NENENG NINA MARYANA,S.Pd

MARIA, S.Pd

Seksi Kesenian : :FITRIA LISMANI, S.Pd
:ZANROSMELIS, S.Pd.AUD
:ELLYZA SOLFATYA,S.Pd.AUD

Seksi Humas : :DISWATI, S.Pd.AUD
:NING KHAIRUNNISA, S.Pd
:LAILA DEVY, S.Pd.AUD

Keadaan Guru TK Negeri Pembina Tembilahan

Adapun tenaga pendidik (guru) di TK Negeri Pembina Tembilahan pada saat ini berjumlah 15 orang, diantaranya guru PNS berjumlah 9 orang, guru bantu 4 orang, dan guru honorer 2 orang, dan satu penjaga sekolah.

Keadaan Anak TK Negeri Pembina Tembilahan

Adapun keadaan siswa di TK Negeri Pembina Tembilahan pada saat ini berjumlah keseluruhan siswa baik itu kelompok A maupun kelompok B berjumlah 1 orang siswa, dengan jumlah kelas yaitu 9 kelas, dengan total jumlah 135 orang siswa

Keadaan Ruangan, Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

Proses belajar mengajar akan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di TK Negeri Pembina Tembilahan sebagai berikut:

Sarana Prasarana di TK Negeri Pembina Tembilahan

Berikut rincian bangunan atau ruangan di TK Negeri Pembina Tembilahan .

Tabel IV.1 : Daftar Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Ruang Belajar	5	Baik
2	Ruang Kepala Sekolah	1	Baik
3	Ruang TU	-	Tidak ada
4	Ruang Majelis Guru	1	Baik
5	Perpustakaan	-	Tidak ada
6	Pendopo	1	Rusak Berat
7	Gudang	1	Baik
8	Ruang Dapur	1	Baik
9	WC	3	1 Baik, 2 Rusak Sedang
10	UKS	-	Tidak ada
11	Area Bermain	1	Rusak Sedang

Sumber : Profil TK Negeri Pembina Tembilahan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Berikut ini penulis sajikan identifikasi informan meliputi jumlah informan, tingkat umur informan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dra. BASRIANI	Kabid PAUD dan DIKMAS	Informan
2	NURHAYATI, S.Mn	Kasi Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS	Key Informan
3	AL-IKHSANUL KHAIR, ST	Staf Teknis Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas	Informan
4	TRIMURTI, S.Pd	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilahan	Informan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

1. Tingkat umur

Umur menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Identitas informan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 Tingkat Umur Informan

No	Umur	Jumlah
1	20-30 tahun	1
2	31-40 tahun	0
3	41-50 tahun	3
	Total	4

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa informan yang paling banyak berusia 41-50 tahun yakni 3 orang sedangkan umur informan 31-40 tahun tidak ada, dan informan umur 20-30 tahun sebanyak 1 orang.

Dilihat dari umur informan dapat di kategorikan cukup produktif dalam pengumpulan data informan.

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam segala bidang terutama dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi ilmu dan skill yang dimiliki pegawai, sehingga pada gilirannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada para pegawai mendapatkan hasil yang optimal. Tingkat pendidikan informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Informan Penelitian

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SMA	0
2	Lulusan Strata Satu (S1)	4
3	Lulusan Magister (S2)	0
	Total	4

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan semua informan berada pada Lulusan Strata Satu (S1).

3. Jenis Kelamin

Berikut jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1
2	Perempuan	3
	Total	4

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin informan didominasi oleh perempuan yaitu berjumlah 3 orang sedangkan laki-laki berjumlah 1 orang

B. Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Usia dini (0-6 tahun) merupakan masa yang sangat penting dan berpengaruh terhadap seluruh tahapan perkembangan seorang manusia. Masa ini sering disebut dengan usia emas atau *golden age* karena di periode ini potensi kecerdasan anak berkembang lebih pesat dibanding periode selanjutnya. Oleh karena itu, anak-anak usia dini sangat membutuhkan layanan pendidikan agar proses tumbuh kembang berbagai potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal

Untuk menunjang proses pembelajaran diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik akan semakin mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, dan salah satu tugas nya adalah Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Penulis menggunakan 3 indikator yang digunakan yakni :

- a. Penyusunan program
- b. Penyelenggaraan kebijakan
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

1. Penyusunan Program

Penyusunan program adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dan penaksiran jumlah sumber-sumber yang dialokasikan pada setiap program.

Adanya kebijakan pemerintah dalam kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana PAUD melalui Website Dapodik (data pokok pendidikan) dan aplikasi Krisna DAK yang berfokus pada data-data sarana dan prasarana PAUD, untuk sinkronisasi data dan pembuatan usulan bantuan sarana prasarana PAUD pada tahun yang akan datang.

Untuk mengetahui apa program atau kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan sarana dan prasarna PAUD, dapat

dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Ibu Dra. Basriani yaitu sebagai berikut : “Apakah ada program atau kegiatan untuk meningkatkan sarana prasarana PAUD (TK Negeri Pembina Tembilahan) dan jika ada apakah program ini bermanfaat untuk masa depan sarana PAUD ?”

“Kita punya aplikasi yang namanya Krisna DAK. Jadi TK Negeri Pembina Tembilahan, tidak hanya TK itu saja sebenarnya, tapi semua TK Negeri di Inhil ini memperbaiki data sarana dan prasarana nya pada Dapodik. Lalu selanjutnya usulan bantuan sarana dan prasarana dibuat dan dimasukkan dalam aplikasi Krisna DAK. Aplikasi ini tersinkronisasi langsung dengan Kemendikbud, jadi data sarana prasarana paud yang di isi oleh masing masing PAUD di terima langsung oleh Kemendikbud. Ini kalau bantuan dana nya berasal dari dana DAK, kalau bantuan nya dari APBD beda lagi. Kalau dana bantuan dari APBD, yang digunakan sistem aplikasi nya namanya SIPD. Dinas Pendidikan yang menginput data kegiatan yang akan dilaksanakan di sistem ini, jadi kalau ada kegiatan rehab, semenisasi TK, disinilah kami input data nya”

Selanjutnya untuk mengetahui secara lebih rinci sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari hasil wawancara ini, maka peneliti juga menanyakan hal serupa kepada informan lain. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS Ibu Nurhayati, S.Mn dengan hasil sebagai berikut :

“Setiap tahun ada kegiatan sarana itu, misalnya untuk rehabilitasi, untuk WC(toilet), untuk semenisasi, hanya saja untuk TK Negeri Pembina Tembilahan, karena ini TK negeri ya. Biasanya kalau TK Swasta perlu menggunakan proposal untuk pengajuan bantuan nya, proposal ini harus dimasukkan setahun sebelumnya. Kalau TK Negeri tidak begini. Kalau misalnya ada pengajuan ke Dinas Pendidikan bahwa sarana ini rusak, sarana itu rusak, turun tim dari Dinas Pendidikan untuk mengecek ke lapangan, baru lah diajukan. Jadi tak perlu menggunakan proposal. Contoh nya pendopo TK Negeri Pembina Tembilahan, turun dulu Tim Teknis Dinas Pendidikan untuk mengecek ke lapangan. Kalau memang sudah sangat mendesak untuk diperbaiki, di ajukan, dan ternyata dapat dana nya ini untuk tahun 2022 ini untuk pendopo TK tu.”

Selanjutnya hal yang serupa, hasil wawancara peneliti tentang Kegiatan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan sarana prasarana TK dengan Staf Teknis

Bidang Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS Bapak Al-Ikhsanul Khoir, ST dengan hasil sebagai berikut :

“Jadi kami dari Dinas punya kegiatan setiap tahunnya, baik itu rehabilitasi gedung, ruang kelas, semenisasi, pembangunan ruang kelas, kira kira itu lah kegiatan nya. Kegiatan-kegiatan ini itu untuk semua TK, termasuk lah TK Negeri Pembina Tembilihan. Asal dana bantuan nya ini ada 2, dari DAK dan dari APBD. Kita fokus ke APBD ya, kalau dari APBD, itu perjalanan nya mulai dari musrembang desa/kelurahan, sampai nanti akhir nya ke musrembang kabupaten. Lalu lanjut proses selanjut nya, lanjut, lanjut, sampai akhirnya nanti disetujui, setelah disetujui kami input data nya, setelah tidak ada lagi perbaikan baru lah bisa dilaksanakan kegiatan tu.”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti tentang Kegiatan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan Sarana Prasarana TK dengan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilihan Ibu Trimuti, S.Pd dengan hasil sebagai berikut :

“Kalau untuk program bantuan memang ada, untuk tahun depan ada. Kalau mau lebih rinci bisa ditanya sama orang Dinas. Kami sekarang ini sekolah penggerak dapat bantuan, namanya BOP kinerja. Beberapa tahun ini kami dapat bantuan rutin dari dinas, seperti alat tulis, alat kesehatan, dan alat kebersihan, kualitasnya bagus. Memang inilah yang TK butuhkan. Dinas minta masukan dari TK apa saja yang dibutuhkan TK.”

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai kegiatan-kegiatan setiap tahun nya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana TK. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan Pembangunan Gedung, pembangunan ruang kelas, rehab, semenisasi dan kegiatan lainnya. Walaupun bantuan sarana dan prasarana yang didapat oleh TK Negeri Pembina didapat secara bertahap, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan kegiatannya dengan cukup baik, meskipun masih ada saran lain yang perlu diperbaiki, namun Dinas Pendidikan menilai bahwa perbaikan

pendopo TK Negeri Pembina Tembilahan sebagai prioritas dan kegiatan rehabilitasi pendopo ini dapat berjalan tahun 2022 ini.

Selanjutnya untuk mengetahui apa kriteria TK yang layak untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dan siapa atau pihak mana yang menentukan, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS yaitu sebagai berikut : “Siapa yang menentukan suatu sekolah layak untuk mendapat bantuan sarana prasarana? Dan bagaimana kriteria sekolah layak mendapat bantuan sarana?”

“Jika bantuan berasal dari dana DAK, usulan penerimaan bantuan sarana prasarana dibuat berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbud. Kalau bantuannya dari dana APBD Usulan bantuan sarana pendidikan bidang PAUD berdasarkan prioritas dan aspirasi DPRD tertuang dalam rencana kegiatan anggaran tahun berjalan.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang kriteria TK yang layak mendapat bantuan sarana prasarana yang disampaikan oleh Kasi Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Bantuan sarana ini ada 2 sumber, satu dari dana DAK, satunya lagi dari dana APBD. Kalau dari dana DAK, itu TK-TK menginput data sekolah mereka ke Dapodik. Ini tersinkron langsung dengan Kemendikbud, jadi data masing-masing TK ini diterima langsung oleh Kemendikbud. Lalu selanjutnya, kalau bantuannya dari dana APBD, itu pertama yang dilakukan adalah musrembang desa/kelurahan. Setelah dapat hasilnya lanjut ke musrembang kecamatan, setelah musrembang kecamatan barulah lanjut ke musrembang kabupaten. Nah di musrembang kabupaten ini lah finish nya.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang kriteria TK yang layak mendapat bantuan sarana dan prasarana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Staf Teknis bidang Sarana dan Prasarana PAUD yaitu sebagai berikut :

“Yang menentukan TK mana yang dapat bantuan sarana itu, kalau dana DAK Kemendikbud, kalau APBD berdasarkan prioritas dalam RKA tahun berjalan. Jadi kalau bantuan dari DAK, itu TK input data nya ke Dapodik, dapodik ini sinkron ke Kemendikbud, Kemendikbud yang langsung terima datanya. Kalau dari APBD itu prioritas nya hasil dari musrembang. Setelah musrembang, masukkan laporan kegiatan, habis itu rapat keputusan. Nanti dibawa ke DPRD disidang Paripurna. Setelah disetujui, baru kami input, sudah itu baru lah bisa dilaksanakan.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang kriteria TK yang layak mendapat bantuan sarana dan prasarana dapat dilihat dari wawancara dengan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilahan yaitu sebagai berikut :

“Kalau kriteria TK mana yang dapat bantuan, itu mereka punya kriteria nya sendiri. Kami TK disuruh masukkan data, kami masukkan, di suruh perbarui data kami perbarui. Itu biasanya untuk bantuan sarana TK ini mereka ada musrembang itu, menentukan TK mana yang dapat bantuan. Tapi dari Staf Teknis dari Dinas Pendidikan datang juga ke sekolah, kalau kami melapor ada sarana rusak. Kami lapor mereka datang, mereka cek sarana nya, nanti Dinas yang usulkan rehab sarana itu. Kalau disetujui ya dapat lah kami bantuan, contohnya pendopo kami ini, katanya 2022 ini sudah bisa dikerjakan.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui sumber dana bantuan sarana dan prasarana TK Negeri berasal dari 2 sumber yaitu dana DAK dan dana APBD. Jika bantuan berasal dari dana DAK, yang menentukan TK mana yang mendapatkan bantuan adalah Kemendikbud. Jika bantuan berasal dari dana APBD, mereka mengadakan musrembang yang dimulai dari musrembang desa/kelurahan sampai akhirnya finish di musrembang kabupaten untuk menentukan prioritas TK yang mendapat bantuan sarana. Dalam kasus ini, Dinas Pendidikan telah berperan

dengan cukup baik dilihat dari turunnya Staf Teknis Dinas Pendidikan ke lokasi saat TK Negeri Pembina Tembilahan memberikan laporan sarana rusak ke Dinas. Jika mereka menilai bahwa sarana ini perlu segera diperbaiki, mereka akan mengajukan bantuan, dan setelah disetujui, maka kegiatan pun dapat dilaksanakan. Walaupun untuk saat ini baru pendopo yang akan mendapatkan rehab dalam waktu dekat.

2. Penyelenggaraan Kebijakan

Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Jadi penyelenggaraan kebijakan adalah perbuatan melaksanakan kebijakan yang telah di susun sebelumnya.

Dinas pendidikan kab indragiri hilir melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PAUD melalui pengusulan bantuan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana APBD dan dana DAK.

Untuk melihat bagaimana mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana PAUD, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kabid PAUD dan DIKMAS sebagai berikut : “Bagaimana Mekanisme pengusulan bantuan sarana prasarana PAUD?”

“Bantuan sarana dan prasarana Paud berasal dari 2 sumber, Dari dana APBD dan dana DAK. Dari dana DAK, Langkah pertama PAUD harus memperbaiki data sarana prasarana nya pada DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Kedua, usulan usulan dibuat berdasarkan hasil verifikasi kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dimasukkan kedalam aplikasi KRISNA DAK. Selanjutnya, akan dilaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi bantuan dak untuk tahun yang akan datang. Setelah sinkronisasi dilaksanakan MOU antara dinas pendidikan dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Untuk dana APBD, Usulan bantuan sarana pendidikan bidang PAUD berdasarkan prioritas dan aspirasi DPRD tertuang dalam rencana kegiatan anggaran tahun berjalan.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana TK disampaikan oleh Kasi Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Perjalanan untuk kegiatan APBD itu musrenbang desa/kelurahan dulu. Setelah dapat hasilnya, lalu musrenbang kecamatan. Setelah musrenbang kecamatan barulah musrenbang kabupaten. Nah di msurenbang kabupaten itu lah finish nya, kegiatan apa-apa aja yang masuk untuk kegiatan APBD 2 tahun kedepan. Ini kan 2021, jadi Januari Februari kemarin musrenbang itu. Sesudah selesai musrenbang kabupaten, sudah keluar hasilnya, masukkan laporan kegiatan di TAPD.(Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dilaksanakan rapat WAPPAS, untuk menentukan semua kegiatan apa yang akan dilaksanakan di tahun depan. Setelah selesai WAPPAS diadakanlah rapat keputusan. Setelah itu dibawa di DPRD di sidang Paripurna DPRD. Nanti setelah disetujui DPRD ini kegiatan nya, ini anggaran nya, baru lah kita bisa nginput. Dinas menginput segala kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan melalui sistem aplikasi SIPD. Yang di input itu RUP (Rencana Umum Pengadaan). Setelah di input, setelah tidak ada lagi perbaikan, ketuk palu di DPRD tadi sudah selesai, jadi sudah bisa dilaksanakan kegiatannya.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana TK disampaikan oleh Staf Teknis Sarana Prasarana PAUD dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau dana DAK TK upload data ke Dapodik, sinkron langsung ke Kementerian, jadi kita bahas yang APBD saja lah ya. Kalau dana APBD itu tergantung kebutuhannya, itu melalui musrenbang. Tapi kalau memang sudah sangat-sangat mendesak untuk diperbaiki, itu diajukan. Turun Tim Teknis sebelum pengajuan. Laporan dari Tim Teknis tadi itu lah yang menyatakan bahwa, oh iya, ini harus mendapat bantuan. Kalau APBD, kalau DAK dari Dapodik. Hasil dari pembangunan DAK di review oleh inspektorat 3 kali review, tahap pertama, kedua, ketiga. Kalau APBD tidak. Kemudian pelaksanaannya pun kebanyakan kalau APBD itu sistem kontraktual maksudnya menggunakan pihak ke 3. Kalau dana DAK kegiatan dilaksanakan dengan swakelola, pihak dari sekolah. Untuk sistem kontraktual, masukkan profil perusahaannya dulu, kalau lengkap segala kelengkapannya dan data pendukung, oke disetujui untuk melaksanakan. Kegiatan itu lalu diajukan ke PPBJ, PPBJ lah yang membuat kontrak nya.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana TK disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilihan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau kami ada sarana yang rusak, kami lapor ke pihak Dinas Pendidikan. Setelah kami lapor nanti Tim mereka datang ke sekolah untuk mengecek. Nanti mereka yang nilai apa sarana yang rusak ini memang sudah sangat mendesak untuk diperbaiki, kalau iya mereka yang ajukan. Kalau disetujui, ya dapat lah kami bantuannya, kalau tidak disetujui ya lihat tahun depannya.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa mekanisme pengusulan bantuan sarana dan prasarana TK yang bersumber dari dana APBD dimulai dengan musrenbang. Dimulai dari musrenbang desa, ke kecamatan, dan berakhir di musrenbang kabupaten. Dilanjutkan dengan rapat keputusan, lalu dibawa ke DPRD untuk di sidang. Setelah disetujui maka Dinas Pendidikan menginput kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sistem mereka (SIPD) dan jika tidak ada lagi perbaikan, kegiatan pun sudah bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sudah berperan dengan baik dalam hal ini. Dinas menginput data sesuai hasil musrenbang yang disetujui sebelumnya. Juga Dinas Pendidikan melakukan pengecekan kepada TK, termasuk TK Negeri Pembina Tembilihan untuk melihat kondisi sarana prasarana di sekolah. Jika sarana tersebut memang sudah sangat mendesak untuk diperbaiki, maka Dinas Pendidikan mengajukan usulan bantuan. Jika usulan disetujui, didapat dananya, kegiatan pun bisa dilakukan. Walaupun untuk saat ini TK Negeri Pembina Tembilihan hanya mendapat bantuan pendopo yang akan diperbaiki pada tahun depan.

3. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pelaporan

Untuk melihat bagaimana Dinas Pendidikan dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sarana prasarana TK, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kabid PAUD dan DIKMAS sebagai berikut :

“Bagaimana cara dinas pendidikan dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sarana prasarana PAUD?”

“Pertama, pembinaan dilakukan secara berkala, dengan memberikan pelatihan dapodik yang diberi batas cut off Tahap pertama 30 maret dan cut off tahap kedua 30 september setiap tahun. Pengawasan, Bekerjasama dengan inspektorat kab inhil dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana paud. Monitoring dilakukan oleh dinas pendidikan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan kegiatan sarana prasarana ke setiap titik lokasi pelaksanaan. Evaluasi, Hasil dari seluruh kegiatan sarana prasarana di evaluasi dan diverifikasi sebagai tindak lanjut untuk usulan bantuan selanjutnya. Untuk DAK fisik Pelaporan dilakukan melalui aplikasi omspan ke kemendikbud. Untuk APBD Pelaporan melalui sipd kab inhil”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana Dinas Pendidikan dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sarana prasarana TK disampaikan oleh Kasi Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Jika TK memberi laporan bahwa ada sarana yang rusak, tim dari Dinas Pendidikan datang mengecek ke lokasi, tim mendata dan menilai kondisi sarana tersebut. Jika memang mendesak untuk diperbaiki, kami ajukan. Lalu dalam pelaksanaan kegiatan APBD ini, sistem nya kontraktual. Kami mengecek data-data dari pihak ke 3, mengecek kelengkapan perusahaan dan data pendukung, baru setelah itu dibuatkan kontraknya. Pada saat pihak kontraktor sedang mengerjakan kegiatan, kami juga datang ke lokasi pembangunan untuk mengecek apa sesuai yang dibuat mereka dengan spek, kami melakukan pengawasan.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana Dinas Pendidikan dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sarana prasarana TK disampaikan oleh Staf Teknis Bidang Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kami selalu mengingatkan kepada TK-TK agar mengisi data di Dapodik sesuai dengan kebenaran, jangan jika sarana tidak ada dibuat ada, yang rusak di buat bagus di Dapodik. Karena dapodik ini sinkron langsung dengan Kemendikbud, Kementerian melihat data dari sini. Kalau pengawasan, kami datang ke lokasi pembangunan saat pihak ke 3 bekerja, untuk melihat hasil pekerjaan mereka dan melihat kesesuaiannya dengan spek yang kita harapkan. Setelah selesai baru kita membuat laporan evaluasinya.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang bagaimana Dinas Pendidikan dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap sarana prasarana TK disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembian Tembilahan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada pengawasan dari dinas, mereka datang kesini, kita laporkan aja. Ada yang datang kesini lihat barang yang rusak, pokoknya ada yang rusak kita lapor, sekolah butuh mereka datang. Juga dulu-dulu waktu kami dapat bantuan bangunan, waktu orang-orang tu kerja dari Dinas Pendidikan datang juga melihat, setelah selesai datang lagi melihat, sudah sesuai atau belum dengan spek mereka”

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan fungsinya dengan baik. Mereka datang dan mengecek ketika TK melakukan pelaporan sarana yang rusak dan mengawasi pihak ke 3 (pihak kontraktor) yang bekerja dan melihat apakah bangunan yang dibangun sesuai dengan spek yang diharapkan.

C. Hambatan-hambatan Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui hambatan Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir , dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid PAUD dan DIKMAS sebagai berikut :

“Kesulitan mendapatkan bantuan sarana prasarana dari dana APBD dikarenakan terbatasnya anggaran APBD yang ada. Juga dana untuk TK Negeri Pembina Tembilahan kalau untuk di bidang seperti pembangunan maupun rehab itu kecil. Dana PAUD itu kebanyakan berasal dari dana aspirasi. Ini tetap juga APBD tapi dana aspirasi namanya yang digunakan. Bantuan dari dana aspirasi ini kebanyakan TK swasta yang dapat, TK Negeri kurang. Juga hambatan lain itu kurangnya sumber daya manusia di TK. Beda dengan SD, SMP yang ada TU sama penjaga sekolah, TK tidak punya. Jadi pemeliharaan bangunan yang ada tidak terjaga, karena sekolah tidak ada penjaganya. Jadi bangunan bisa dimasuki masyarakat, mainannya dimainkan anak-anak diluar dari anak sekolah, jadi kondisinya cepat rusak.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang hambatan Dinas Pendidikan disampaikan oleh Kasi Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Pertama itu sumber daya manusia nya kurang. SDM nya belum memadai. Misalnya di TK itu tidak ada penjaga sekolah, tidak seperti SD dan SMP. Jadi untuk pemeliharaan bangunan TK yang ada sulit terjaga. Karena sekolah tidak punya penjaga, bangunan sekolah bisa dimasuki masyarakat, tempat bermain nya bisa dimainkan oleh anak-anak di luar TK yang membuat kondisi mainannya lebih cepat rusak. Hambatan lain, itu kalau lagi musim penghujan, pihak ke 3 yang mengerjakan pembangunan jadi lambat selesai pekerjaannya. Kadang juga pihak ke 3 ini melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang kita harapkan. Terus pihak ke 3 yang mengerjakan itu pun kadang bukan kita yang memilih, yang memilih itu biasanya mereka yang punya dana. Hambatan selanjutnya dana

untuk TK negeri Pembina Tembilahan di bidang seperti pembangunan dan rehab itu kecil. Dana nya kebanyakan dari dana aspirasi, dana anggota dewan. Orang dewan agak enggan untuk bantu sekolah negeri tu. Kalau untuk sekolah negeri, setelah penganggaran dana untuk pembangunan, masih harus lagi menganggarkan biaya pemeliharaan selama bangunan itu ada, kalau swasta tidak.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang hambatan Dinas Pendidikan disampaikan oleh Staf Teknis Sarana Prasarana PAUD dan DIKMAS dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kan kalau APBD ini sistem kontraktual, jadi yang mengerjakan pihak ke 3. Kami memilih pihak ke 3 ini berdasarkan hasil kerja mereka sebelumnya. Kami cari tahu bagaimana pekerjaan mereka di tempat lain, bagaimana reputasi mereka, lalu kami tunjuk mereka untuk mengerjakan kegiatan ini. Tapi kadang pihak ke 3 nya bukan kami yang memilih. Di situsai ini kadang kami jumpai saat kami mengecek ke lokasi, yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan spek. Ini lah masalahnya. Kadang transportasi nya juga sulit dicapai ke TK itu, tapi kalau TK Negeri Pembina tak ada masalah di transportasi, mudah lah kami mencapai lokasi nya.”

Selanjutnya hal yang serupa tentang hambatan Dinas Pendidikan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tembilahan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Kita bahas ke bantuan sarana rutin ya, kalau hambatan ini lebih untuk TK Negeri Pembina kecamatan lain, apalagi yang jauh dari sini (Tembilahan). Itu bantuan sarana nya yang dalam bentuk alat tulis, alat kesehatan dan alat kebersihan harus diambil TK masing-masing. Kalau untuk TK kami bukan hambatan kok, lokasi kami dekat dari Dinas Pendidikan. Cuma kemarin itu waktu kami dapat rehab, waktu itu musim hujan, terlewat batas waktu akhir penyelesaian nya oleh kontraktor nya. Ya karena kondisi cuaca mau bagaimana, tapi yang harus nya bisa selesai cepat jadi selesai lebih lambat. Pelaporan dan evaluasi Dinas pun jadi terhambat. Juga itu ada TK lain yang pembangunannya tidak sesuai spek, jadi Dinas suruh pihak ke 3 yang mengerjakan untuk menyesuaikan dengan ancaman dana nya tidak dapat dibayarkan jika tidak sesuai. Hal yang seperti ini juga menjadi hambatan.”

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan hambatan dari Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan pertama terletak pada kecil nya dana untuk TK Negeri Pembina Tembilahan dibidang rehab maupun pembangunan. Dana ini kebanyakan berasal dari dana aspirasi dan anggota dewan agak enggan membantu TK negeri, karena setelah dibangun perlu untuk menganggarkan biaya pemeliharaan selama bangunan itu ada, berbeda dengan TK swasta, setelah dibangun tidak ada penganggaran biaya pemeliharaan nya..
2. Hambatan kedua terletak pada Sumber Daya Manusia nya yang belum memadai. Karena TK tidak punya penjaga sekolah dan TU, jadi pemeliharaan bangunan yang ada tidak terjaga. Dan karena TK tidak ada penjaga nya, bangunan itu bisa dimasuki masyarakat, tempat bermain nya bisa dimainkan anak-anak diluar anak TK jadi kondisinya akan cepat rusak.
3. Hambatan ketiga terletak pada kondisi cuaca ketika musim penghujan, yang akan menghambat proses kelancaran pembangunan.
4. Hambatan keempat terletak pada pihak ke 3 atau pihak kontraktor yang mengerjakan kegiatan sarana. Terkadang pihak ke 3 melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spek dari Dinas Pendidikan, dan terkadang yang memilih pihak ke 3 bukan Dinas Pendidikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan mengenai kesimpulan atas penemuan yang didapat di bab-bab sebelumnya yang telah diselesaikan. Dari hasil penelitian sebelumnya mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan peran nya dengan cukup baik. Bantuan sarana dan prasarana berasal dari 2 sumber, dana DAK dan APBD. Perjalanan untuk kegiatan APBD pertama mengadakan musrenbang yang dimulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai akhirnya finish di musrenbang kabupaten untuk menentukan prioritas TK yang mendapat bantuan sarana. Setelah dilakukan rapat keputusan, lalu dibawa ke DPRD untuk di sidang. Setelah persetujuan DPRD, Dinas Pendidikan melakukan penginputan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Setelah itu kegiatan sudah bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan juga melakukan pengecekan kepada TK, termasuk TK Negeri Pembina Tembilahan untuk melihat kondisi sarana prasarana di TK. Jika sarana tersebut memang sudah sangat mendesak

untuk diperbaiki, maka Dinas Pendidikan mengajukan usulan bantuan. Jika usulan disetujui, didapat dana nya, kegiatan pun bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan juga mengawasi pihak ke 3 (pihak kontraktor) yang bekerja dan melihat hasil akhir, apakah bangunan yang dibangun sesuai dengan spek yang diharapkan.

- b. Adapun hambatan dari Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu : Hambatan pertama terletak pada kecil nya dana untuk TK Negeri Pembina Tembilahan dibidang rehab maupun pembangunan. Dana ini kebanyakan berasal dari dana aspirasi dan anggota dewan agak enggan membantu TK negeri, karena setelah dibangun perlu untuk menganggarkan biaya pemeliharaan selama bangunan itu ada, berbeda dengan TK swasta, setelah dibangun tidak ada penganggaran biaya pemeliharaan nya. Hambatan kedua terletak pada Sumber Daya Manusia nya yang belum memadai. Karena TK tidak punya penjaga sekolah dan TU, jadi pemeliharaan bangunan yang ada tidak terjaga. Dan karena TK tidak ada penjaga nya, bangunan itu bisa dimasuki masyarakat, tempat bermain nya bisa dimainkan anak-anak diluar anak TK jadi kondisinya akan cepat rusak. Hambatan ketiga terletak pada kondisi cuaca ketika musim penghujan, yang akan menghambat proses kelancaran pembangunan. Hambatan keempat terletak pada pihak ke 3 atau pihak kontraktor yang mengerjakan kegiatan sarana. Terkadang pihak ke 3

melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spek dari Dinas Pendidikan, dan terkadang yang memilih pihak ke 3 bukan Dinas Pendidikan.

2. Hambatan dan Kendala

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan informan penelitian tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dijumpai hambatan yaitu :

- a. Hambatan pertama terletak pada kecil nya dana untuk TK Negeri Pembina Tembilahan dibidang rehab maupun pembangunan. Dana ini kebanyakan berasal dari dana aspirasi dan anggota dewan agak enggan membantu TK Negeri, karena memerlukan penganggaran biaya pemeliharaan bangunan setelah bangunan selesai dibangun.
- b. Hambatan kedua karena TK tidak punya penjaga sekolah, jadi pemeliharaan bangunan yang ada tidak terjaga. Dan karena TK tidak ada penjaga nya, bangunan itu bisa dimasuki masyarakat, tempat bermain nya bisa dimainkan anak-anak diluar anak TK jadi kondisinya akan cepat rusak.
- c. Hambatan ketiga terletak pada kondisi cuaca ketika musim penghujan, yang akan menghambat proses kelancaran pembangunan.
- d. Hambatan keempat terletak pada pihak ke 3 atau pihak kontraktor yang mengerjakan kegiatan sarana. Terkadang pihak ke 3 melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spek dari Dinas Pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana TK Negeri Pembina Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, penulis dengan rendah hati memberikan saran yaitu :

1. Bagi Dinas Pendidikan

Diharapkan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat tetap mempertahankan dan mengembangkan kinerja nya yang dinilai bagus oleh TK, seperti saat TK melaporkan adanya sarana yang rusak, Dinas Pendidikan datang ke lokasi untuk mengecek kondisi saran, bantuan rutin yang didapat TK setiap tahunnya berupa berbagai alat tulis dan sebagainya.

2. Bagi TK Negeri Pembina Tembilahan

Diharapkan untuk TK Negeri Pembina Tembilahan dapat mencari alternatif lain sebagai solusi untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada. Bisa di komunikasikan dengan pihak Dinas Pendidikan untuk bagaimana agar masalah ini dapat terselesaikan, sehingga untuk sarana dan prasarana yang ada kedepannya dapat bertahan lebih lama karena perawatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustian, G. S. dan A. G. (2008). *Mencintai bangsa dan negara : pegangan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia*. Bogor: Sarana Komunikasi Utama.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Daryanto. (2008). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(9), 1689–1699.
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi & otonomi daerah : desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintah daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Helmawati. (2015). *Mengenal Dan Memahami Paud*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kansil, C. S. T. (1986). *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA*. BALAI PUSTAKA.
- Kasan, T. (2000). *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Studia Press.

- Makin, B. & M. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam Trnsformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, D., & Dkk. (2020). *KHAZANAH PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM Dari Wacana Lokal Hingga Tatanan Global*. Bandung: Cendekia Press.
- Nasution, M. N. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. BANJARMASIN: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2015). *KYBERNOLOGY Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Rahayu, E. F. (2015). MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK PESERTA DIDIK. *MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 24(5), 357–366.
- Sedarmayanti. (2004). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2014). *ILMU PEMERINTAHAN* (1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

1. Fitriani, F. (2018). PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PERUMUSAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN ANAK RAWAN PUTUS SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 – 2015. *Jom Fisip*, 5(1), 1–15.
2. Gazali, M. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(9), 1689–1699.
3. Hermin Werdiningsih, S. R. S. (2016). PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENERAPAN METODA PEMBELAJARAN YANG TERINTEGRASI (INTEGRATED LESSON LEARNED) DARI MATA KULIAH YANG SERUMPUN. *MODUL*, 16(1), 55–66.
4. Rahayu, E. F. (2015). MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KECERDASAN MAJEMUK PESERTA DIDIK. *MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 24(5), 357–366.
5. Suci, R. P., Suhermin, S., & Triyonowati, T. (2017). Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Pada Pos Paud Di Kelurahan Merjosari Malang. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.21067/jip.v7i1.1555>

DOKUMEN

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati No.47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir

